



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAM RACHMA MARCILLIA
2. Jabatan : SEKRETARIS DEPARTEMEN TEKNIK ARSITEKTUR DAN PERENCANAAN
3. NHK : 867918

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.260.000.000
1. Tanah Seluas 166 m ² di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000		
2. Tanah Seluas 53 m ² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
3. Tanah Seluas 500 m ² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000		
4. Tanah Seluas 160 m ² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m ² /100 m ² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	103.000.000
1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
2. MOTOR, HONDA SPACY Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.600.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	295.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	50.000.000
Sub Total	Rp.	2.709.600.000

**III. HUTANG****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.	180.000.000
Rp.	2.529.600.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.